

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alec Stone, *The Birth Of Judicial Politics In France: The Constitutional Council In Comparative Perspective*, (New York: Oxford University Press, 1992).

_____. *Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe*, (New York: Oxford University Press, 2000).

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).

Budiono Kusumohamidjojo, *Suatu Studi terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian*, (Bandung: Binacipta, 1986).

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Edy Suryono, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional*, (Bandung: Remaja Karya, 1984).

Firman Hasan, *Kekuasaan Pembuatan Perjanjian Internasional Limitasi menurut Undang-Undang Dasar di Indonesia*, (Padang: Andalas University Press, 2016).

Harjono, *Politik Hukum Perjanjian Internasional*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1999).

I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2002).

J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Jimly Asshiddie dan Ahmad Syahrizal, *Peradlin Konstitusi di 10 Negara*, (Jakarta: Snar Grafika, 2012)

Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007) .

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999).

M Ali Safa'at, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2011).

Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca amandemen Konstitusi*, (Jakarra: Rajawali Pers 2013).

Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisus, 1998).

Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1992).

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 2015).

Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013).

Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis tentang Kelembagaan Negara*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010).

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).

Setyo Widagdo, *Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik*, (Malang: Bayu Media, 2008).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011).

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Depok: Rajawali Press, 2018).

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

Zainal Arifin Hosein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*, (Malang: Setara Press, 2016).

Jurnal

Ade Irawan Taufik “Bola Panas Pengujian Undang-Undang Pengesahan Piagam ASEAN” *Rechtsvinding* Vol. 1, Nomor 3, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Oktober 2013, halaman 4.

Afidatussolihat, “Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian ASEAN Charter oleh Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, Nomor 1, UIN Syarif Hidayatullah, Juni 2014, halaman 154.

Alek Karci Kurniawan, “*Judicial Preview* sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Suatu Rancangan Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, Nomor 4, Mahkamah Konstitusi RI, Desember 2014, halaman 633.

Andi Sandi, “Konsekuensi Pembatalan Undang-Undang Ratifikasi terhadap Keterkaitan Pemerinta Indonesia pada perjanjian Internasional”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24, Nomor 3, Universitas Gajah Mada, Oktober 2012, halaman 460.

Dian Utami, “Pengujian Konstitusional, *Yuridika*, Vol. 29, No. 3, Universitas Airlangga, September 2014, halaman 29.

Dimas Firdausy, “Menggagas Mekanisme Preventive Review Oleh MK, Upaya Percepatan Pembangunan Nasional melalui Produk Hukum Berkualitas” *Law and Justice Journal*, Vol. 4 Nomor 1, Universitas Islam Indonesia, April 2019, halaman 30.

Galuh Candra Purnamasari, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan *Judicial Review* Terhadap Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional”, *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 2 Nomor 1 Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Oktober 2017, halaman 12.

Gerald E. Songko, “Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969” *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 4, Nomor 4, Universitas Sam Ratulangi, April 2016, halaman 50.

HM. Aziz, “Beberapa Catatan tentang Lahir dan Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 6 Nomor 3, September 2009, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, halaman 17.

Januari Sihotang, Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Lemabag Penguji Undang-Undang Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN”, *Jurnal Maranatha*, Vol. 3, Nomor 4, Universitas Kristen Maranatha, Januari 2015, halaman 42.

Muhammad Reza Maulana, “Upaya Menciptakan Produk Hukum Berkualitas Konstitusi melalui Model *Preventif Review*” *Jurnal Konstitusi*, Vo. 15, Nomor 4, Mahkamah Konstitusi, Desember 2018, halaman 784.

Nabiatus Sa'adah, "Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi dan Konstitusi Khususnya dalam Menjalankan *Constitutional Review*", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, Nomor 2, Juni 2019, Universitas Diponegoro, halaman 237.

Novianto M.Hantono, "Isu Krusial RUU Pemilu dan Gagasan ke Depan untuk Efektivitas Pembahasan, *Majalah Info Singkat Hukum*, Vol. 9, Nomor 12, Dewan Perwakilan Rakyat RI, Juni 2017, halaman. 3.

Putu Wawan Suryawan, "Sah Tidaknya Anggota Perwakilan Daerah Masuk Partai Politik", *Khertanegara*, Universitas Udayana, Mei 2018, halaman 2.

Soegiyono, "Analisa Ratifikasi Perjanjian Internasional (Tinjauan dari Sudut Konvensi Ketatanegaraan Indonesia" *Warta Lapan*, Nomor 30/31, halaman 23.

Teresa Vrilda, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 terhadap Proses Pengesahan Perjanjian Internasional di Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Vol 8, Nomor 4, Maret 2018, Universitas Diponegoro, halaman 2784.

Victor Imanuel W. Nelle,"Konstruksi Model Pengujian *Ex Ante* terhadap Rancangan Undang-Undang di Indonesia" *Journal Konstitusi*, Vol. 10, Nomor 3, Mahkamah Konstitsu, September 2013, halaman 12.

Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

TAP MPR No. IX/MPR/1999 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan UUD 1945.

TAP MPR No. IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Hukum Internasional

Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional.

Internet

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>,
diakses pada 10 Januari 2021, Pukul 03.40 WIB.